




Kebijakan Konservasi Kehutanan APP

Kajian Perkembangan oleh Greenpeace
Oktober 2013

GREENPEACE



“ Greenpeace memberi peringatan bahwa setiap perusahaan yang ingin melanjutkan perdagangan jenis apapun dengan APP harus menerapkan kondisi yang ketat bagi kontrak komersial terutama yang membutuhkan perkembangan lebih lanjut terhadap Kebijakan Konservasi Kehutanan serta isu-isu kebijakan yang tertunda lainnya yang akan dibahas dalam kajian ini. ”

Foto depan:

Hutan Gambut Kerumutan

0° 07'54.55"S 102° 41'00.93"E

Foto udara pemandangan hutan gambut dan konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa di Kerumutan, Riau. Hutan rawa gambut Kerumutan Riau merupakan habitat penting bagi Harimau Sumatra, Februari 2012.

©Jufri/ Greenpeace

Koridor Truk Kayu

1° 49'53.03"S 104° 11'15.58"E

Jalur truk kayu di konsesi

PT Tri Pupajaya di Sumatra Selatan.

Banyak konsesi di gambut dan hutan

hujan berada di habitat Harimau

Sumatra yang terancam punah,

Oktober 2011

©Rante/Greenpeace

Pendahuluan

Pada awal 2013, Asia Pulp & Paper (APP) telah mengumumkan kebijakan terbaru yang disebut Kebijakan Konservasi Hutan.¹ Kebijakan tersebut mencakup penangguhan segera terhadap seluruh kegiatan pembukaan hutan oleh pemasok, juga komitmen untuk tidak lagi mengembangkan usaha perkebunan di wilayah berhutan. Di dalam rantai pasokan APP, kawasan hutan alam sedang diidentifikasi melalui definisi Stok Karbon Tinggi yang ditentukan oleh The Forest Trust (TFT).

Kebijakan Konservasi Hutan juga mengikat pemasok APP untuk memastikan “tidak ada lagi kanal lanjutan atau pembangunan infrastruktur di wilayah konsesi milik pemasok yang belum dikembangkan di wilayah lahan gambut tidak berhutan hingga penilaian Hutan Stok Karbon Tinggi, termasuk masukan dari ahli gambut, selesai dilakukan”. Greenpeace kemudian menghentikan kampanye aktif terhadap APP untuk memberikan perusahaan tersebut ruang dan waktu guna mengimplementasikan komitmen “Tidak ada Deforestasi”.



Setelah pertemuan dengan manajemen senior APP di Jakarta pada September 2013, juga setelah beberapa kali pertemuan dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga fokus pada isu kehutanan di Indonesia, laporan ini menyampaikan perspektif Greenpeace atas perkembangan dari implementasi komitmen APP terhadap Kebijakan Konservasi Hutan tersebut. Adapun laporan ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Perkembangan terhadap komitmen spesifik yang terurai dalam Kebijakan Konservasi Hutan
2. Kebijakan komitmen lebih lanjut, klarifikasi dan verifikasi

Greenpeace bersama LSM-LSM lain telah merekomendasikan perusahaan yang dipasok oleh APP harus terus mengamati kinerja APP dengan Kebijakan Konservasi Hutan yang diterapkannya. Greenpeace memberi peringatan bahwa setiap perusahaan yang ingin melanjutkan perdagangan jenis apapun dengan APP harus menerapkan kondisi yang ketat bagi kontrak komersial terutama yang membutuhkan perkembangan lebih lanjut terhadap Kebijakan Konservasi Kehutanan serta isu-isu kebijakan yang tertunda lainnya yang akan dibahas dalam kajian ini. Greenpeace juga menyambut baik keputusan APP untuk menggunakan jasa pihak ketiga sebagai auditor terhadap implemmtasi Kebijakan Konservasi Hutan yang akan memberi penilaian terhadap perkembangan kebijakan tersebut.

Pada Desember 2012 Greenpeace menahan rencana peluncuran laporan “deforestasi APP berlanjut” sementara dilakukannya perundingan terakhir antara Greenpeace dan manajemen senior APP atas Kebijakan Perlindungan Hutan.

¹ Kebijakan Konservasi Kehutanan APP. www.asiapulppaper.com/partners-suppliers/code-conduct

1. Perkembangan atas komitmen spesifik yang terurai dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP

MEMAHAMI DAN MENILAI KEMAJUAN KOMITMEN KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN

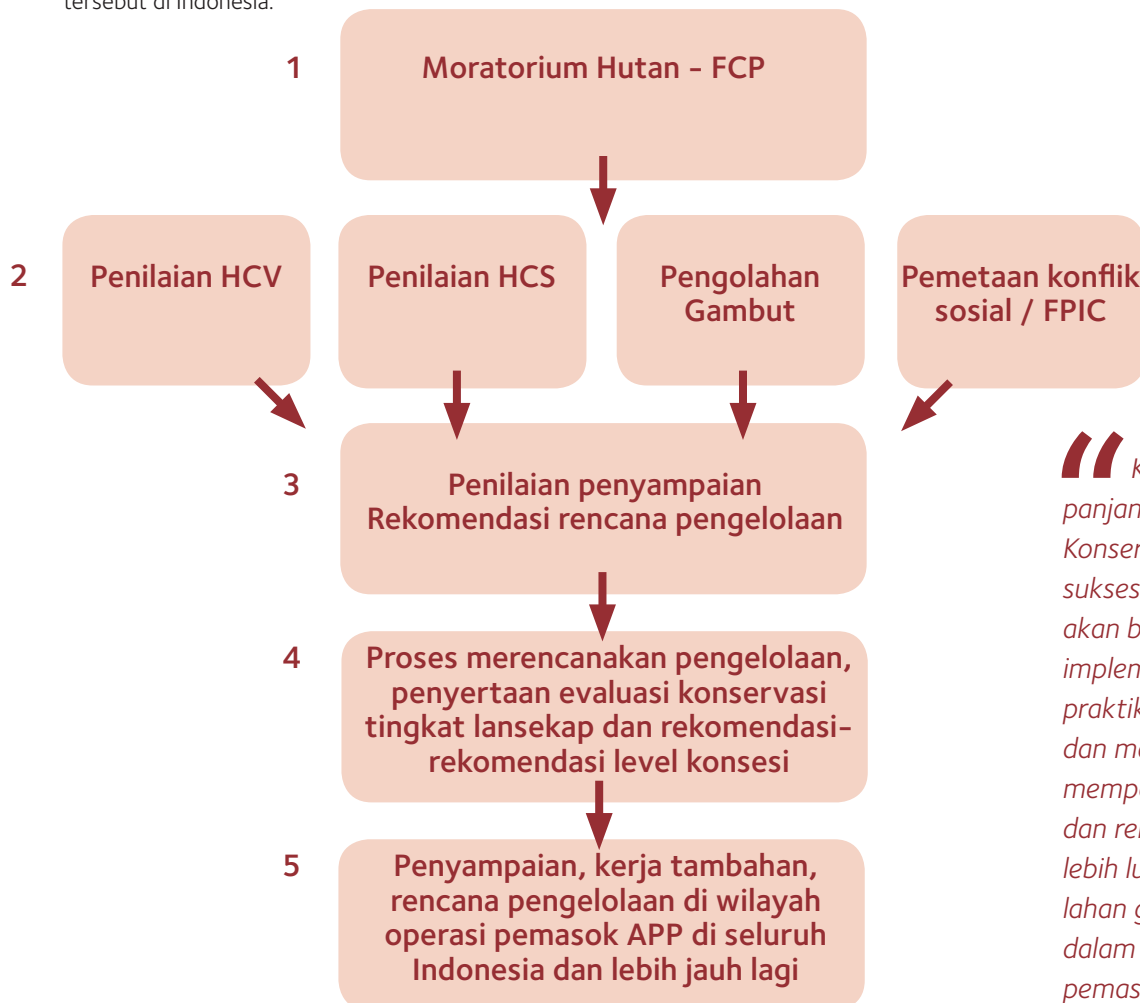
Saat ini APP masih berada dalam tahap awal implementasi komitmen Kebijakan Konservasi Hutan. Banyak penilaian konservasi yang akan menjadi dasar bagi komitmen Kebijakan Konservasi Hutan masih berlangsung – gambaran realitas pengaturan proses untuk perusahaan berskala besar seperti APP.

Keberhasilan jangka panjang dari Kebijakan Konservasi Hutan, akankah sukses atau terpuruk, akan bergantung pada implementasi APP dalam praktik konservasi dan manajemen yang mempengaruhi perlindungan dan rehabilitasi hutan yang lebih luas dan lansekap lahan gambut di Indonesia, dalam wilayah operasi para pemasoknya. Model konservasi di Indonesia ini nantinya akan mencerminkan rantai pasokan APP dalam skala dunia.

Diagram sederhana di bawah ini akan memperlihatkan uraian berbagai tahapan dalam implementasi proses tersebut di Indonesia.

Dalam kerangka waktu singkat, ada tiga cara menilai perkembangan ini:

1. Pengumuman penangguhan perambahan hutan diumumkan pada Februari (tahap satu dalam diagram alur di atas);
2. Kualitas Stok Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi, lahan gambut, dan penilaian konflik sosial, rekomendasi-rekomendasi, serta manajemen proses perencanaan (tahap dua, tiga, dan empat dalam diagram alur di atas);
3. Penyelesaian yang memprioritaskan kasus-kasus konflik sosial (lihat bagian pemetaan konflik sosial dan resolusi di bawah ini).



“ Keberhasilan jangka panjang dari Kebijakan Konservasi Hutan, akankah sukses atau terpuruk, akan bergantung pada implementasi APP dalam praktik konservasi dan manajemen yang mempengaruhi perlindungan dan rehabilitasi hutan yang lebih luas dan lansekap lahan gambut di Indonesia, dalam wilayah operasi para pemasoknya. ”

TAHAP PERTAMA: PENANGGUHAN PERAMBAHAN HUTAN

Pada 1 Februari 2013, APP mengumumkan akan segera mengakhiri perambahan hutan di seluruh rantai pasokannya. Sebelumnya, hingga komitmen tersebut diumumkan, para pemasok APP telah merambah ribuan hektar hutan tiap bulan.

APP bersama TFT telah mengkonfirmasi dua kasus perambahan hutan yang melanggar Kebijakan Konservasi Kehutanan, penangguhan perambahan hutan. Temuan pertama adalah PT RIA yang diidentifikasi oleh investigasi oleh LSM (Juni 2013).² Penemuan kedua diidentifikasi dan diumumkan oleh APP/ TFT melalui proses internal setelah kasus RIA (PT BMH, PT SBA, dan PT BAP pada September 2013).³ Adapun total area hutan yang telah dirambah diperkirakan mencapai 140ha.

Proses internal yang dilakukan oleh APP/ TFT juga mengidentifikasi area seluas hampir 28ha dimana TFT kesulitan mengambil keputusan mengenai status wilayah tersebut, apakah termasuk dalam wilayah hutan Stok Karbon Tinggi atau tidak.⁴ Bagaimanapun juga, perambahan terjadi di lahan gambut, sehingga melanggar komitmen Kebijakan Konservasi APP yang menyatakan tidak akan ada pembangunan lebih lanjut di atas lahan gambut.

Laporan lebih lanjut dari kelompok LSM menunjukan perambahan hutan juga dilakukan oleh konsesi milik pemasok APP di Kalimantan. Investigasi yang dilakukan TFT atas kasus ini menemukan bahwa perambahan hutan terjadi lantaran adanya tumpang-tindih izin konsesi, dan tidak berhubungan dengan pemasok APP.



Tweet dari Aida Greenbury, Direktur Keberlanjutan APP yang merayakan muatan kayu terakhir hutan hujan menuju pabrik bubur kertas APP.

Penilaian Greenpeace:

Pelanggaran Moratorium: Secara umum implementasi penangguhan perambahan hutan dan lahan gambut berhasil dilakukan, meski dalam beberapa kasus telah ditemukan adanya kegagalan dalam proses pengecekan internal. Dua pelanggaran yang dijelaskan di atas – yang pertama berkaitan dengan penangguhan perambahan hutan, dan yang kedua adalah penangguhan pembangunan di atas wilayah gambut – menghasilkan kesepakatan awal dengan komunitas lokal. Meski demikian, kasus-kasus tersebut telah diidentifikasi dan dinilai dengan layak, sehingga persoalan dapat dipecahkan melalui solusi alternatif untuk menghindari perambahan hutan alami dan lahan gambut.

Greenpeace menyambut baik keputusan APP yang telah sukarela mengumumkan pelanggaran komitmen Kebijakan Konservasi.

Tumpang tindih perizinan: Kerumitan proses penerbitan izin di Indonesia menggambarkan ancaman mendasar bagi seluruh sektor swasta yang hendak mengimplementasikan langkah-langkah konservasi hutan. Telah banyak kasus yang terdokumentasi mengenai persoalan pemberian izin kepada beberapa sektor industri sekaligus untuk satu wilayah yang sama pada masa yang sama. APP dan perusahaan-perusahaan lain yang ingin mempraktekkan bisnis yang bertanggung jawab harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk memecahkan persoalan perizinan tersebut.

Sebagai langkah awal, yang dibutuhkan adalah transparansi melalui keterbukaan informasi oleh kedua perusahaan, serta pemerintah mengenai tingkat permasalahannya. APP telah menyatakan akan menyajikan informasi yang relevan dalam diskusi para pemangku kepentingan yang akan dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi Greenpeace merekomendasikan agar informasi tersebut juga ditampilkan dalam dashboard situs milik APP/ TFT sebagai rujukan atas implementasi dari komitmen mereka. APP juga membutuhkan konsultasi jangka pendek berkaitan dengan kasus-kasus spesifik mengenai tumpang tindih area hutan alami, dengan berfokus pada pencarian jalan keluar terbaik yang mendukung keberhasilan langkah-langkah konservasi.

“ Secara umum implementasi penangguhan perambahan hutan dan lahan gambut berhasil dilakukan, meski dalam beberapa kasus telah ditemukan adanya kegagalan dalam proses pengecekan internal. ”

2 Laporan pembuktian PT RIA – www.asiapulppaper.com/system/files/TFT%20verification%20report%20-%20%20RIA.pdf

3 Laporan pembuktian PT BMH, PT SBA and PT BAP – www.asiapulppaper.com/system/files/TFT%20Sumsel%20report.pdf

4 PT SPM & PT BDL verification report – www.asiapulppaper.com/system/files/TFT%20SPM%20BDL%20report.pdf

BAGIAN DUA: PENILAIAN – KONSERVASI BERNILAI TINGGI, STOK KARBON TINGGI, LAHAN GAMBUT, DAN ISU SOSIAL

a. Penilaian dan proses Konservasi Bernilai Tinggi

APP menggunakan dua konsultan sekaligus untuk penilaian Konservasi Bernilai Tinggi, yang pertama adalah APCS dikerjakan oleh juru taksir yang dulunya bekerja untuk Smartwood/ Rainforest Alliance dan Ekologika, yang dikerjakan oleh orang dulunya bekerja untuk Conservation International.

Penilaian APCS telah diprakarsai terlebih dahulu, dan kini mencapai tahap rekomendasi manajemen terhadap proses tersebut. Sementara sebagian besar proses penilaian ekologi masih berada dalam tahap penilaian lapangan.

Saat ini APP mengembangkan perencanaan proses manajemen dan konservasi yang akan meliputi konsultasi dengan banyak pihak luar di bidang konservasi, serta para ahli lainnya. Perusahaan juga mengidentifikasi konsesi-konsesi pada hutan dan lahan gambut yang akan melewati proses perencanaan dalam waktu tertentu.

Greenpeace menyadari adanya beberapa kritik terkait Konservasi Bernilai Tinggi terkait dengan: a) konsep penilaian tidak tersedia lebih awal untuk memberi kesempatan kepada LSM-LSM untuk benar-benar terlibat dalam proses tersebut, dan b) tidak ada komitmen dari APP untuk menyajikan laporan akhir. APP telah menanggapi kritik tersebut dengan menyetujui proses konsultasi lanjutan bagi konsep penilaian dan akan menyediakan laporan untuk kepada LSM dan para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam Kebijakan Konservasi Hutan.

Penilaian Greenpeace:

Keberhasilan proses Konservasi Bernilai Tinggi akan bergantung pada kualitas dan kekuatan rekomendasi manajemen senior APP dan bagaimana mereka merespon isu tersebut – rekomendasi putaran pertama seharusnya telah tersedia sebelum akhir 2013.

Sementara itu perkembangan dapat dinilai melalui kualitas proses konsultasi dan pilihan penilai independen untuk meneliti konsep penilaian. Greenpeace memandang, meskipun ada beberapa persoalan, namun secara umum keseluruhan proses dapat dinilai telah cukup kuat lagi komprehensif. Greenpeace menyarankan APP untuk menerbitkan jadwal rencana manajemen dalam dashboard situs perusahaan.

“ Greenpeace memandang, meskipun ada beberapa persoalan, namun secara umum keseluruhan proses dapat dinilai telah cukup kuat lagi komprehensif. ”

b. Penilaian dan Proses Stok Karbon Tinggi

Penilaian Stok Karbon Tinggi dilaksanakan oleh TFT untuk menciptakan batasan bagi wilayah hutan alami yang tersisa di wilayah para pemasok APP dengan menggunakan kombinasi antara analisa pemetaan dan pengambilan contoh lapangan. Hutan Stok Karbon Tinggi dikelompokkan oleh tingkat tetumbuhan antara lahan terdegradasi (yang dahulunya mungkin wilayah berhutan namun kini tersisa semak belukar dan padang rumput), serta memperbaharui penilaian lapangan mengenai hutan alami sekunder. Adapun kategori-kategori ini telah disahkan melalui proses pembuktian.

Penilaian Stok Karbon Tinggi diutamakan dilakukan di konsesi milik pemasok yang terindikasi memiliki paling banyak memiliki sisa hutan alami. Target penyelesaian penilaian Stok Karbon Tinggi ini di akhir 2013. Penilaian lanjutan di konsesi yang memiliki lebih sedikit (atau tidak memiliki sama sekali) hutan alami diharapkan akan diidentifikasi diluar wilayah konservasi, dan harus terlaksana sebelum kuartal kedua 2014. Berdasarkan undangan APP, Greenpeace telah berpartisipasi sebagai penilai berdasarkan pengambilan contoh Stok Karbon Tinggi di lapangan.

Penilaian Greenpeace:

Proses Stok Karbon Tinggi akan ditentukan oleh luasan hutan yang tersisa untuk dilindungi di seluruh wilayah konsesi pemasok APP, penentuan ini menjadi penting terkait dengan pengaruhnya terhadap Kebijakan Konservasi Hutan. Keputusan oleh APP/TFT untuk berfokus kepada konsesi-konsesi dengan sisa hutan terluas adalah logis. Bagaimanapun juga waktu pemenuhan penilaian Stok Karbon Tinggi tak harus sejalan dengan pemenuhan Konservasi Bernilai Tinggi. Hal tersebut semestinya disesuaikan dengan tahapan perencanaan manajemen, selain itu juga menjadi penting bagi APP untuk menunjukkan para pemangku kepentingan bahwa hasil dari penilaian yang berbeda-beda ini tetap sejalan dan terintegrasi dengan efektif.

Sebagai hasil dari pelanggaran penangguhan pembukaan hutan oleh RIA (telah dijabarkan dalam bagian penangguhan pembukaan lahan di atas), LSM telah mempertanyakan kredibilitas proses penilaian Stok Karbon Tinggi. Mereka mengkalim bahwa wilayah yang dirambah pada Februari 2013 bukanlah stok karbon tinggi berdasarkan investigasi “cepat” penilaian Stok Karbon Tinggi. Baik TFT maupun APP menyadari bahwa proses Stok Karbon Tinggi tidak dilakukan dengan benar dalam kasus tersebut, bahwa penilaian Stok karbon Tinggi seharusnya melalui proses peninjauan kembali sebelum finalisasi. Berdasarkan persetujuan APP, hasil akhir seharusnya juga disajikan kepada para pembangku kepentingan.

Sebab itu APP seharusnya menunjukkan – melalui perkembangan dan implementasi rencana manajemen – bahwa seluruh wilayah hutan Stok karbon Tinggi akan dilindungi.

c. Penilaian dan proses lahan gambut

Sejumlah ahli independen telah memperkirakan terjadinya penurunan besar kualitas lahan di wilayah perkebunan pada kubah gambut di seluruh Indonesia, dari waktu ke waktu wilayah tersebut akan semakin tidak dapat digunakan untuk perkebunan kayu bubur-kayu (kayu pulp) atau jenis perkebunan lain.

Terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kasus perkebunan kayu pulp milik APP, terkait dengan luasan lahan gambut yang terkena dampak. Alasan pertama berhubungan dengan pelepasan emisi gas rumah kaca melalui wilayah terdampak, akibat pengeringan dan perkembangan perkebunan dalam skala luas. Pertimbangan lainnya adalah kelangsungan perekonomian jangka medium hingga panjang di wilayah tersebut terkait dengan penurunan kualitas lahan gambut akibat perkembangan perkebunan. Bagaimanapun juga, APP tampaknya memiliki sedikit sekali data objektif mengenai perhitungan penurunan kualitas lahan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam perencanaan jangka panjang terpercaya. Hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar.

Identifikasi perluasan geografis dan kedalaman wilayah lahan gambut di konsesi milik pemasok APP telah dilakukan oleh ahli lahan gambut sebagai bagian dari proses penilaian Stok Karbon Tinggi. Hasil dari penilaian tersebut harus sudah tersedia dalam hasil akhir laporan Stok Karbon Tinggi. APP telah merencanakan untuk mendirikan tim ahli independen sebagai pemberi saran untuk pengelolaan lahan gambut di konsesi milik pemasok guna minimalisasi emisi gas rumah kaca. Tim tersebut hingga kini belum ada dan masih dalam tahap diskusi penentuan unsur-unsur dalam tim.

Penilaian Greenpeace:

Mengingat tantangan dalam mengelola emisi gas rumah kaca di lasekap lahan gambut, kemajuan dibatasi pada moratorium pengembangan hutan dan lahan gambut. Data awal dari distribusi lahan gambut dan kedalamannya masih dikumpulkan sebagai bagian dari penilaian Stok Karbon Tinggi yang masih berlangsung. Melampaui tahap tersebut terdapat penilaian data dan rekomendasi bagi kedua konsesi, dan wilayah lahan gambut yang lebih luas di lokasi konsesi. Hingga level tertentu, perkembangan yang lambat tak terelakkan lantaran kompleksitas pemetaan lahan gambut dan selisih keputusan mengenai cara terbaik untuk mengonservasi dan mengelola lahan gambut.

Perkembangan komitmen APP terhadap lahan gambut harus ditingkatkan pada enam bulan ke depan. Greenpeace merekomendasikan pengambilan dua aksi jangka pendek untuk dilakukan dalam hal ini:

1. Memperoleh data objektif terpercaya mengenai nilai penurunan pada saat ini dan prediksi di wilayah-wilayah tersebut;

2. Penilaian tingkat lansekap mengenai konservasi dan campur tangan bagi pengelolaan lahan gambut yang dinilai paling berdampak terkait dengan mitigasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

d. Pemetaan konflik sosial dan resolusi

Free and Prior Informed Consent (FPIC) adalah prinsip yang menyatakan bahwa masyarakat berhak menyetujui atau tidak menyetujui proyek yang dapat mempengaruhi, menempati, atau menggunakan lahan masyarakat adat.

APP telah berkomitmen untuk mengimplementasi FPIC di seluruh perkembangan perkebunan baru, terutama melalui proses penilaian Stok karbon Tinggi dan pemetaan komunitas oleh TFT. Perusahaan juga telah menyatakan akan mengimplementasi proses FPIC pada lokasi pabrik bubur kertas terbaru.

Sebagai tambahan, APP telah berkomitmen untuk mengatasi konflik sosial pada seluruh rantai pasokannya di Indonesia, dan bekerja sama dengan TFT untuk memetakan konflik-konflik tersebut, juga untuk mengembangkan pertimbangan spesifik dalam konsultasi dengan komunitas guna memecahkan konflik-konflik tersebut. Sejumlah area juga telah diprioritaskan dalam resolusi konflik, bahkan APP dan TFT juga telah mengumumkan proses signifikan dalam wilayah-wilayah prioritas pada Juli 2013.

Penilaian Greenpeace

Kemajuan di wilayah resolusi konflik membesarkan hati, baik dalam hal pengambilan keputusan oleh APP mengenai wilayah prioritas bagi resolusi konflik dan juga kemajuan yang telah diumumkan dalam persoalan ini – Senyerang di Provinsi Jambi – telah menandatangani perjanjian dengan komunitas lokal untuk memecahkan sengketa yang telah lama terjadi.

APP perlu menunjukkan hasil-hasil pemetaan konflik yang saat ini dikerjakan bersama pemangku kepentingan yang relevan dan menggunakan hasil tersebut untuk membantu mengidentifikasi area prioritas selanjutnya dalam proses resolusi konflik.

FPIC di wilayah perkembangan perkebunan akan diimplementasikan melalui proses penilaian Konservasi Bernilai Tinggi dan pemetaan komunitas. Para pemangku kepentingan akan memantau dengan hati-hati untuk melihat bagaimana hasil dari proses tersebut dimasukkan ke dalam rencana manajemen mengenai konsesi milik pemasok APP.

“Kemajuan di wilayah resolusi konflik membesarkan hati, baik dalam hal pengambilan keputusan oleh APP mengenai wilayah prioritas bagi resolusi konflik dan juga kemajuan yang telah diumumkan dalam persoalan ini.”

TAHAP TIGA, EMPAT, LIMA: MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN RENCANA KONSERVASI MANAJEMEN TERINTEGRASI

Implementasi penuh atas Kebijakan Konservasi Kehutanan pertama-tama menghendaki APP untuk menunjukkan perkembangan konservasi gabungan dan rencana manajemen yang mengintegrasikan rekomendasi dari berbagai penilaian yang dilakukan dalam Stok Karbon Tinggi, Bernilai Konservasi Tinggi, serta faktor-faktor lainnya. Kedua, APP harus menunjukkan dari waktu-ke-waktu bahwa rencana-rencana ini juga mengikat kegiatan operasional seluruh rantai pasokan di Indonesia.

APP merencanakan konservasi dan tahapan perencanaan manajemen akan tercapai sebelum akhir 2013 bagi konsesi di setidaknya satu wilayah utama operasional. Tak pelak finalisasi dan implementasi dari rencana-rencana tersebut diperkirakan terjadi lebih lambat.

Penilaian Greenpeace:

Sebagaimana diindikasikan oleh bagian sebelumnya, APP saat ini berada pada tahap awal pengembangan proses konservasi dan manajemen tanam. Sebab itu masih terlalu dini untuk menilai kemajuan proses tersebut. Finalisasi awal dari perencanaan tersebut diperkirakan baru akan paripurna pada kuartal pertama 2014. Sangat penting bahwa rencana ini dikembangkan dengan mempertimbangkan hutan dan lahan gambut, bersama ahli konservasi ternama yang membantu selama proses perkembangan. APP telah mengkonfirmasi bahwa mereka menempatkan tim manajemen dalam wadah yang sama untuk mengatasi persoalan ini, tetapi rencana yang lebih terperinci masih dalam tahap penyelesaian.

Jelas sekali tampak bahwa keberhasilan Kebijakan Konservasi Hutan pada level konservasi jangka panjang bergantung pada level konsesi di perencanaan manajemen yang sejalan dengan inisiatif konservasi yang lebih luas (lihat bagian "APP dan konservasi hutan di Indonesia").

Sebagai tambahan, APP harus menunjukkan kemajuan dalam pengembangan dan pelaksanaan pada level perencanaan manajemen kepada publik melalui mekanisme pelaporan.

“ Sangat penting bahwa rencana ini dikembangkan dengan mempertimbangkan hutan dan lahan gambut, bersama ahli konservasi ternama yang membantu selama proses perkembangan. ”

KOMITMEN KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN LAINNYA DARI APP

a. Rantai pasokan dunia

Pada Februari 2013, APP berkomitmen untuk mendukung “manajemen hutan yang bertanggung jawab” atas seluruh rantai pasokan dalam skala global.

Sebagian besar perhatian LSM dan media kepada APP terfokus pada operasi di Indonesia, termasuk mengenai sejumlah besar perhitungan berkesinambungan yang diumumkan perusahaan yang lebih terfokus pada kemajuan jangka pendek.

Bagaimanapun juga rantai pasokan global APP mulai meluaskan pabrik ke Eropa, Kanada, Amerika Latin, dan Cina.

APP bahkan memiliki pabrik bubur kertas berkapasitas signifikan di Cina, yang mengandalkan pasokan dari perkebunan di Cina dan negara sekitarnya seperti Vietnam dan Thailand. Kampanye awal oleh Greenpeace di Cina juga menyoroti sejumlah masalah yang berkaitan dengan perkembangan perkebunan APP di Provinsi Hainan.

Penilaian Greenpeace:

Fokus utama tugas APP di Cina – didukung oleh TFT – adalah menyelesaikan persoalan yang diangkat oleh LSM mengenai kasus Hainan dan pemetaan rantai pasokan menuju pabrik di Cina guna mengidentifikasi negara dari rantai pasokan berisiko tinggi seperti Vietnam dan Thailand.

Meski pendekatan awal tersebut logis, hal tersebut harus dibarengi dengan program terpadu yang tidak hanya bertujuan memitigasi risiko, tetapi juga untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen kehutanan. Hal tersebut termasuk identifikasi dan perlindungan terhadap wilayah Konservasi Bernilai Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta implementasi FPIC di Cina, juga wilayah lainnya.

Meski APP telah menyediakan informasi terbatas mengenai tugas APP di Cina dalam dashboard situs mereka, lebih banyak informasi harus disajikan mengenai tata cara identifikasi risiko rantai pasokan dan bagaimana proses penyelesaian secara aktif yang dilakukan oleh APP/ TFT. Lebih lanjut, dashboard pada website perusahaan juga perlu menampilkan pemangku kepentingan dan informasi terkini yang relevan, konsultasi misalnya, terkait dengan aktivitas APP/TFT yang kini mengikutsertakan LSM di Cina.

Pada level transparansi berkaitan dengan pekerjaan yang tengah berlangsung di Cina, APP harus menunjukkan peningkatan berarti dalam enam bulan ke depan.

“ Pada level transparansi berkaitan dengan pekerjaan yang tengah berlangsung di Cina, APP harus menunjukkan peningkatan berarti dalam enam bulan ke depan. ”

b. Perluasan di masa depan

APP sangat jelas mengenai komitmen Kebijakan Konservasi Hutan berlaku bagi “seluruh perluasan di masa depan”. Adapun area perluasan dapat dibagi menjadi dua: 1) pemasok dan perusahaan mitra terbaru; 2) pertumbuhan dan keuntungan dari perkebunan yang sudah ada.

1. Pemasok dan perusahaan mitra terbaru

APP telah berkomitmen untuk menghentikan seluruh perambahan hutan sebagai bagian Kebijakan Konservasi Hutan. Sejumlah total 38 “pemasok kayu bubur kertas mutakhir” saat ini sudah berada dalam bagian implementasi Kebijakan Konservasi Hutan (38 perusahaan saat ini memasok kayu bubur kertas kepada dua pabrik APP di Indonesia).

Meskipun komitmen ini relatif mudah memberi penilaian dan pengawasan kepada para pemasok kayu bubur kertas yang ada saat ini, namun sangat penting hal ini juga dapat diaplikasikan bagi pemasok kayu bubur kertas atau perusahaan mitra baru di masa yang akan datang.

Penilaian Greenpeace:

Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan saat ini secara khusus menargetkan perusahaan-perusahaan yang memasok kayu kepada pabrik APP pada masa kini (“daftar pemasok APP pada saat ini”).

Greenpeace menyambut baik keputusan APP dalam mengembangkan prosedur guna mengatasi persoalan penerapan Kebijakan Konservasi Hutan untuk “pemasok kayu bubur kertas di masa yang akan datang – hal tersebut dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa APP tidak terhubung, baik langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan yang melakukan perambahan hutan ataupun melanggar Kebijakan Konservasi Hutan. APP saat ini berada dalam proses finalisasi konsep “Prosedur Asosiasi” dan akan meminta masukan dari para pemangku kepentingan lainnya.

“ Greenpeace menyambut baik keputusan APP dalam mengembangkan kebijakan guna mengatasi persoalan penerapan Kebijakan Konservasi Hutan untuk “pemasok kayu bubur kertas di masa yang akan datang”.”

“ APP sekarang harus menunjukkan prakiraan jangka panjang bagi para pemasoknya di Indonesia secara kuat dan cermat dan siap untuk diawasi.”

2. Pertumbuhan dan riap dari perkebunan yang telah ada

Kebijakan Konservasi Hutan APP pada Februari 2013 menyatakan “penilaian terbaru dari pihak independen mengenai pertumbuhan dan riap dari perkebunan pemasok APP mengkonfirmasi bahwa perusahaan memiliki sumber perkebunan yang cukup untuk memenuhi prakiraan jangka panjang atas permintaan dari pabrik.”

Sejak pernyataan tersebut, APP telah mengumumkan kepada publik bahwa perusahaan telah memberi saham mayoritas PT Oki Pulp and Paper, sebuah perusahaan dengan pabrik yang menghasilkan 2 juta ton bubur kertas per tahun di Sumatera Selatan. Pabrik baru ini akan mulai berproduksi pada 2016 sehingga para pemasok diharapkan dapat menambah pasokan lebih dari 7 juta ton kayu bubur kertas tiap tahunnya apabila ingin memproduksi dengan kapasitas maksimal.

APP telah menugaskan Ata Marie, penilai pihak ketiga yang independen, untuk memberi penilaian terhadap perkebunan dan riapnya. Pernyataan verifikasi dari Ata Marie menunjukkan bahwa APP memiliki jumlah perkebunan bagi serat kayu yang cukup untuk memenuhi kapasitas saat ini, termasuk kapasitas pabrik baru. Pernyataan ini tersedia dalam dashboard situs APP.

APP juga telah menyatakan apabila terjadi kekurangan pasokan serat, selisih yang dibutuhkan akan dipasok melalui serat impor yang memenuhi standar Kebijakan Konservasi Hutan yang dikembangkan perusahaan.

Penilaian Greenpeace:

Para pemasok APP di Sumatera Selatan telah membangun perkebunan akasia yang begitu luas di sekitar pabrik baru milik APP, namun belum jelas apakah para pemasok APP akan memiliki serat perkebunan yang cukup untuk jangka panjang untuk memenuhi kombinasi permintaan kayu pulp untuk tiga pabrik bubur kertas milik APP di Indonesia.

Permintaan serat kayu dari pabrik baru akan meningkatkan permintaan hingga 50% permintaan keseluruhan APP di Indonesia. Ketika pabrik baru beroperasi, seluruh pabrik APP akan membutuhkan pasokan lebih dari 24 juta ton kayu pulp tiap tahunnya.

Secara historis APP belum pernah berhasil memenuhi total kebutuhan serat kayu. Sebab itu sangat penting agar pabrik bubur kertas APP disesuaikan dengan ketersediaan serat kayu. APP sekarang harus menunjukkan prakiraan jangka panjang bagi para pemasoknya di Indonesia secara kuat dan cermat dan siap untuk diawasi. Sebagai tambahan, APP harus mengumumkan kepada publik bagaimana niatan perusahaan untuk meyakinkan perluasan permintaan pabrik kayu dapat dipenuhi oleh 100% serat kayu dari pemasok yang memenuhi Kebijakan Konservasi Hutan.

2. Komitmen kebijakan lebih lanjut, uraian, dan pembuktian

“ Greenpeace memiliki pandangan yang sama dengan NGO lainnya bahwa kebijakan nol campuran kayu tropis pada saat di pabrik APP akan jauh lebih mudah diverifikasi. ”



Lokasi penumpukan kayu Indah Kiat Perawang, tumpukan kayu dari hutan hujan di pabrik bubur kertas Indah Kiat Perawang, APP ©Greenpeace

Sejak Februari tahun ini telah mengajukan sejumlah isu terkait Kebijakan Konservasi Hutan APP. Beberapa isu terfokus pada implementasi penangguhan pembukaan lahan hutan yang telah dijabarkan pada bagian pertama.

Isu lain berfokus pada hal-hal mengenai kekhawatiran bahwa panduan dan prosedur Kebijakan Konservasi Hutan yang ada tidak cukup atau bahkan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan proses audit/ pembuktian yang harus diambil.

Isu tersebut telah diajukan terkait dengan jumlah komitmen yang dipublikasikan APP sebagai “Visi 2020 Target dan Komponen”.

Apakah APP akan terus menggunakan campuran kayu tropis atau beralih kepada 100% serat kayu HTI di Indonesia?

Dokumen “Visi 2020” menyatakan APP berencana menggunakan “100% kayu HTI untuk produksi bubur kertas per 2020. Melalui Kebijakan Konservasi Hutan APP berkomitmen untuk menghentikan penggunaan serat dari hutan alami, yang akan diidentifikasi melalui penilaian Konservasi Bernilai Tinggi dan Stok Karbon Tinggi sebagaimana dijabarkan pada bagian pertama. Bagaimanapun juga perusahaan tetap dapat menggunakan serat campuran kayu tropis dari area yang bukan Konservasi Bernilai Tinggi/ Stok Karbon Tinggi sebagaimana perkembangan perkebunan di masa mendatang.

Apabila Konservasi Bernilai Tinggi/ Stok Karbon Tinggi dilaksanakan dengan baik, meskipun volume serat

campuran kayu tropis di rantai pasokan masih terbatas (misalnya penebangan pohon di wilayah semak belukar), pasokan tersebut tidak akan berasal dari wilayah konservasi penting.

Bagaimanapun juga beberapa LSM telah mengajukan kekhawatiran bahwa hal ini sangat sulit untuk dibuktikan dan dapat menjadi celah bagi pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan. Sebagai contoh, pelaksanaan penilaian Konservasi Bernilai Tinggi/ Stok Karbon Tinggi bisa saja tidak cukup, atau campuran kayu tropis dari hutan alami dapat memasok pabrik karena tidak ada pengecekan dari wilayah lainnya.

Sebab itulah APP diminta untuk menetapkan kebijakan nol campuran kayu tropis, terlepas dari asal serat tersebut.

Penilaian Greenpeace:

Pendekatan Konservasi Bernilai Tinggi/ Stok Karbon Tinggi seharusnya dapat memastikan perlindungan terhadap sisa hutan yang terdapat di seluruh wilayah konsesi milik pemasok APP saat ini. Sistem ketertelusuran dan pengamat independen harus selalu ada untuk mengamati pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan dan membantu menjamin bahwa komitmen tersebut sungguh-sungguh dilaksanakan.

Bagaimanapun juga, Greenpeace memiliki pandangan yang sama dengan NGO lainnya bahwa kebijakan nol campuran kayu tropis pada saat di pabrik APP akan jauh lebih mudah diverifikasi. Pendekatan tersebut juga akan lebih sejalan dengan permintaan pasar kepada produsen kertas.

Greenpeace menyambut keputusan APP baru-baru ini mendirikan kelompok kerja dengan LSM untuk menemukan penggunaan alternatif bagi serat campuran kayu tropis yang akan menghasilkan pengembangan di luar area Stok Karbon Tinggi.

APP dan perlindungan hutan di Indonesia / Mengatasi deforestasi terdahulu

APP dan pemasok-pemasoknya telah menebang hutan hujan Sumatra dan Kalimantan secara besar-besaran hingga di akhir Januari 2013, termasuk beberapa wilayah yang diidentifikasi sebelumnya dalam penilaian HCV sebagai wilayah dengan konservasi tinggi. Oleh karena itu pihak pemangku kepentingan (stakeholder) bertanya, jika sebagian besar hutan hujan di konsesi pemasok telah dihancurkan sebelum Februari 2013, lalu kenapa komitmen Kebijakan Perlindungan Hutan perusahaan saat ini dianggap cukup?

Sebelumnya APP telah mengatakan dalam komitmen visi 2020-nya, bahwa hal itu *"mendukung target nasional untuk a) menghutankan kembali lahan yang terdegradasi; b) melestarikan kawasan yang dilindungi dan dikonservasi; c) meningkatkan populasi spesies langka."*

APP telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan isu restorasi hutan dan pintu masuknya bisa melalui rekomendasi yang dihasilkan dari penilaian HCV yang saat ini sedang dilakukan.

Penilaian Greenpeace :

APP telah berdiskusi dengan sejumlah organisasi konservasi terkait dengan inisiatif restorasi atau konservasi tingkat lansekap, di lokasi operasinya di Indonesia. Jika dirasa cukup ambisius, inisiatif ini bisa dimulai untuk mengatasi warisan deforestasi sebelumnya. Greenpeace sepakat dengan LSM bahwa logika yang tepat adalah dengan menghitung pembukaan hutan selama periode sebelumnya ketika menghitung kontribusi konservasi yang harus dilakukan APP.

Greenpeace mencatat bahwa kebijakan FSC untuk anggota menetapkan prinsip bahwa "tidak dapat diterima" dimana lebih dari 10% wilayah hutan alam atau lebih dari 10 ribu hektar hutan (salah satu yang lebih rendah) berada langsung di bawah perusahaan atau dikendalikan secara tidak langsung yang telah dikonversi di dalam periode lima tahun sebelumnya. Pandangan Greenpeace adalah bahwa APP harus sejalan dengan pendekatan ini dan menerapkan prinsip restorasi/konservasi yang setara dalam nilai konservasi setidaknya dalam lima tahun pembukaan hutan di seluruh rantai pemasoknya.

Tetapi Greenpeace juga tahu bahwa besarnya inisiatif tingkatan konservasi lansekap tidak bisa dikelola oleh APP sendiri. Kami berharap agar kepada LSM-LSM dan sektor swasta lainnya untuk bekerjasama mencapai ini.

Pengawasan/Audit Independen

Jejak APP dalam hal transparansi telah mengarah kepada tingkat ketidakpercayaan tinggi dari LSM-LSM dan sejumlah keraguan terkait dengan kebijakan baru perlindungan hutannya. Sejumlah LSM telah mempertanyakan akses tidak terbatas terhadap peta konsesi dan lokasi yang memperbolehkan untuk verifikasi klaim perusahaan, termasuk program audit pihak ketiga untuk verifikasi pelaksanaan komitmen FCP APP.

APP dan TFT telah menetapkan program pengawasan dan mengundang LSM untuk berpartisipasi. Greenpeace bersama sejumlah organisasi di Indonesia telah berpartisipasi dalam program ini. APP/TFT juga telah meluncurkan situs "dasbor" untuk menyediakan informasi lebih detail terhadap pelaksanaan komitmen-komitmen itu. Yang paling terbaru, APP telah mengkonfirmasi rencananya merangkul auditor independen pihak ketiga untuk verifikasi pelaksanaan komitmen Kebijakan Perlindungan Hutan (FCP).

Penilaian Greenpeace:

Greenpeace menyambut baik keputusan APP yang melakukan audit dari pihak ketiga atas pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hutan. Sangat penting bahwa auditor yang telah dipilih memiliki kredibilitas dengan para pemangku kepentingan dan juga cakupan yang jelas dan tepat untuk pekerjaan ini.

Greenpeace menyambut baik keputusan APP memperkenalkan ukuran transparansi selanjutnya, termasuk "dasbor".

Greenpeace sejalan dengan pandangan LSM lainnya bahwa penilaian HCV menyeluruh dan konservasi lainnya harus dibagi dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk kepentingan transparansi. Greenpeace menyambut baik komitmen APP yang melakukan ini tetapi merekomendasikannya agar penilaian tersebut tersedia dalam situs dasbor. Kejelasan dalam program konsultasi juga dibutuhkan di tingkat manajemen perencanaan pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hutan, melanjutkan pekerjaan yang sudah terlaksana sebelumnya.

“ Greenpeace menyambut baik keputusan APP yang melakukan audit dari pihak ketiga atas pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hutan. Sangat penting bahwa auditor yang telah dipilih memiliki kredibilitas dengan para pemangku kepentingan dan juga cakupan yang jelas dan tepat untuk pekerjaan ini. ”

KESIMPULAN-KESIMPULAN

Pada Februari 2013 Greenpeace menghentikan kampanye aktifnya terhadap APP untuk memberikan waktu dan ruang bagi APP melaksanakan kebijakan Perlindungan Hutannya. Selama periode tersebut kami telah menyarankan perusahaan-perusahaan tidak memulai kembali kontraknya dengan APP dan mereka harus menunggu hingga cukup bukti atas penerapan FCP.

Pandangan kami dalam sembilan bulan ini, bahwa perusahaan serius terhadap rencana-rencana FCP dan staf senior mereka secara sungguh-sungguh berkomitmen menggiring penerapan komitmen-komitmen baru ini. Sekarang ini, risiko APP kembali melanggar janjinya semakin kecil.

Bagaimana pun, masih ada dan terus akan ada banyak tantangan. Beberapa bersifat internal, dengan struktur perusahaan yang kompleks membuat penerapannya di 2,6 juta hektar lahan di Indonesia menjadi rumit. Masih terdapat bukti tingkat pemahaman tentang FCP di berbagai bagian APP dan operasi Sinarmas Forestry.

Beberapa pembeli lama APP bertanya pada Greenpeace apakah mereka harus mulai menjalin APP lagi sebagai pemasok. Ulasan ini membuatnya jelas, ada beberapa sinyal bagus tentang penerapan komitmen FCP APP begitu juga dengan kekhawatiran yang masih ada. Anjuran kami saat ini tetap bahwa perusahaan harus terus memantau dan terlibat dengan perusahaan selama pelaksanaan FCP.

Secara khusus, mereka harus mencari kepastian tidak akan ada lagi pelanggaran atas moratorium pembukaan hutan dan pengembangan gambut, seperti yang digariskan dalam FCP. Lebih penting lagi, mengingat komitmen FCP APP sepertinya berdiri atau jatuh tergantung pada kualitas dan kesolidan rekomendasi konservasi dan pengelolaan dari senior manajemen APP, mereka (pembeli) harus menilai apakah kemajuan penting telah dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menanggapi rekomendasi-rekomendasi ini pada waktu yang tepat.

Greenpeace mengingatkan bahwa setiap perusahaan yang berniat melanjutkan kembali perdagangan dengan APP harus menerapkan persyaratan ketat untuk kontrak komersial yang membutuhkan kemajuan lanjutan terhadap kebijakan perlindungan hutan dan isu-isu kebijakan yang masih didiskusikan dalam ulasan ini, seperti perlindungan hutan/restorasi.

Pandangan kami bahwa lapisan tambahan pengawasan yang akan dibawa oleh pembeli yang bertanggung-jawab akan menjadi penting untuk memastikan penerapan komitmen-komitmen APP dalam jangka waktu panjang.

Sementara itu sangat jelas bagi Greenpeace bahwa saat ini ancaman tunggal terbesar untuk pengelolaan hutan yang bertanggungjawab di sektor bubur kertas di Indonesia berasal dari aktifitas APRIL, bagian dari kelompok Raja Garuda Mas. Greenpeace secara aktif tidak menganjurkan perusahaan-perusahaan melakukan bisnis dengan APRIL atau perusahaan satu kelompoknya.

“*Sementara itu sangat jelas bagi Greenpeace bahwa saat ini ancaman tunggal terbesar untuk pengelolaan hutan yang bertanggungjawab di sektor bubur kertas di Indonesia berasal dari aktifitas APRIL, bagian dari kelompok Raja Garuda Mas. Greenpeace secara aktif tidak menganjurkan perusahaan-perusahaan melakukan bisnis dengan APRIL atau perusahaan satu kelompoknya.*”



“ APP telah berdiskusi dengan sejumlah organisasi konservasi terkait dengan inisiatif restorasi atau konservasi tingkat lansekap, di lokasi operasinya di Indonesia. Jika dirasa cukup ambisius, inisiatif ini bisa dimulai untuk mengatasi warisan deforestasi sebelumnya. ”

Pemantauan dampak sektor bubur kertas.

2°10' 32.05" S 104° 24' 33.14" E
Dokumentasi hutan hujan gambut dan perkebunan PT Sumber Hijau Perma Pulpwood di Sumatra Selatan dari udara, Oktober 2011.

©Ardiles/Greenpeace

Oktober 2013

Diterbitkan oleh Greenpeace International

Ottho Heldringstraat 5

1066 AZ Amsterdam

Belanda

enquiries@greenpeace.org

www.greenpeace.org/forests

Persiapan perkebunan
di lahan gambut.

0°04'12.29"N

102°44'15.53"E

Persiapan lahan untuk
perkebunan kayu di KTH Sinar
Merawang, Kerumutan, Riau.

Wilayah ini juga penting bagi
habitat Harimau Sumatra
yang terancam punah,
Oktober 2011.

©Rante/Greenpeace

GREENPEACE